GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Media Indonesia **Tgl/Bln/Thn : 22/1/2005**

Subyek : **Hari : Sabtu**

Kata Kunci : **Halaman : 24**

Pembayaran Jasa Lingkungan di Indonesia Belum Prioritas

JAKARTA (Media): Pembayaran jasa lingkungan di Indonesia sampai saat ini belum menjadi prioritas. Hal ini terlihat dari APBN 2004 yang 70% pendapatan berasal dari eksploitasi sumber daya alam, namun biaya untuk konservasi tidak lebih dari 1%. Hal itu dikatakan Hutomo, Deputi Bidang Kebijakan dan Kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup dalam pembukaan seminar Pembayaran Jasa Lingkungan untuk Perlindungan DAS, Kamis (20/1) di Jakarta.

"70% pendapatan APBN 2004 diperoleh dari eksploitasi sumber daya alam. Sementara untuk biaya konservasi tidak lebih dari 1%. Ini jelas tidak adil. Ada gap sebesar 69%. Sementara APBN ini tidak ada apa-apanya sama sekali terhadap kerugian, kerusakan dan kehilangan sumber daya alam akibat eksploitasi," kata Hutomo. Di dalam era otonomi daerah, menurut Hutomo, pengendalian dampak lingkungan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota dan gubernur. "Sesuai UU No 32 tentang pemerintah daerah, telah dijelaskan dalam pasal 37 bahwa Pemda wajib melestarikan lingkungan. Jadi ini kewajiban. Namun, kenyataannya hal ini tidak dilaksanakan dengan baik. Pemda hanya mengejar keuntungan untuk meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah)," jelas Hutomo. Sesuai dengan pertemuan Rio de Jenero pada 2002, lanjutnya, Indonesia telah melakukan ratifikasi konvensi tersebut. "Ada empat jasa lingkungan yang harus diutamakan oleh setiap daerah, yaitu penyehatan udara dan air, pencegahan banjir, penghancuran dan netralisasi limbah serta jasa lingkungan untuk budaya manusia." Selama ini kerusakan lingkungan, menurut Hutomo, susah dihitung kerugiannya. "Seperti kecelakaan kapal laut di Balikpapan belum ada perhitungan berapa jasa lingkungan yang harus dibayar. *Illegal logging* (penebangan liar) yang nilainya Rp83 miliar per hari tidak ada hitungan untuk pembayaran jasa konservasi." Dalam kesempatan yang sama pakar lingkungan Emil Salim mengingatkan, pengelolaan sumber daya alam bukanlah komoditas barang melainkan murni sebagai sumber daya alam. "Karena sebagai ekosistem sumber daya alam memberikan ruang untuk hidup bagi manusia dan makhluk lainnya. Hutan menangkap hujan. Hutan pun mengembuskan oksigen ke alam dan jadilah hujan kembali. Itu siklus yang tidak bisa dipotong begitu saja." Namun, kenyataan sekarang ini, menurut Emil, siklus alam yang sudah terstruktur dari sananya telah terpotong-potong. "Ketika hujan turun dianggap manusia sebagai anugerah Tuhan. Pemandangan indah, udara segar, air bersih sebagai anugerah Tuhan. Tidak pernah ada jasa untuk lingkungan." Lebih lanjut, mantan Menteri LH tersebut memberi contoh banjir di Jakarta, abrasi pantai dan hilangnya hutan mangrove selama ini telah menimbulkan kerugian besar bagi manusia. "Mereka baru menghitung kerusakan setelah ada bencana. Tetapi, ketika manusia menikmati keindahan alam, air bersih dan sebagainya tidak pernah dihitung. Maka terjadilah eksploitasi sumber daya alam," katanya.

Emil memberi contoh lagi di Maryland, AS, ada sistem jasa lingkungan, penduduk yang tinggal di kawasan risiko bencana harus membayar jasa lingkungan lebih tinggi. Tujuannya agar mereka tetap aman meskipun tinggal di kawasan berisiko. Demikian juga kesepakatan masyarakat New York dengan wali kotanya, karena setiap satu gelas air harganya sama dengan empat gelas air. Dengan kata lain masyarakat harus membayar biaya lingkungan akibat air yang dieksploitasi setiap hari.

Emil kembali mengingatkan kasus banjir di Jakarta yang setiap tahun selalu terjadi. Menurutnya, pembangunan Jakarta di masa Belanda sudah diatur supaya tidak terjadi banjir. Maka Belanda membangun kanal-kanal untuk menyedot air, sementara masyarakat mengungsi. Akan tetapi, pada 1970, daerah aliran sungai (DAS) Kali Angke mulai dihuni masyarakat.

"Saat itu tanah untuk resapan air telah dijadikan kawasan permukiman. Luasnya mencapai 300 hektare. Namun, pada 2000 tanah resapan yang menjadi kawasan permukiman di DAS seluas 4.300 ha. Sedangkan DAS Sungai Pesanggrahan yang semula tanahnya hanya digunakan 0,03%, kini menjadi 8%." Menurut Emil, sebetulnya ada 14 aliran sungai yang bermuara di Jakarta. Dan kawasan DAS tersebut penuh dengan permukiman. Akibatnya, aliran air menjadi tersendat karena terhalang pembangunan.

Jadi, lanjutnya, jalan keluar dari masalah tersebut adalah pembangunan wilayah yang disesuaikan dengan karakter alam sebagai ekosistem total.

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP